



PPDB Sekolah Negeri

Siswa Miskin Disediakan Loket Khusus

JOGJA-- Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta menyediakan loket khusus bagi calon siswa baru dari keluarga miskin pemegang Kartu Menuju Sehat (KMS) yang akan memanfaatkan kuota bagi siswa miskin dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) sekolah negeri.

Berdasarkan Keputusan Walikota Yogyakarta, calon siswa baru dari keluarga miskin pemegang KMS memperoleh kuota sebesar 25 persen di SMP Negeri, 10 persen di SMA Negeri, dan 20 persen di SMK Negeri. Pendaftaran bagi siswa miskin tetap memakai sistem realtime online (RTO), namun mendahului PPDB reguler.

Kepala Bidang Pendidikan Menengah Dinas Pendidikan Kota Yogyakarta, Suyono di kantornya, Rabu (17/6), mengatakan, mereka yang akan memanfaatkan kuota khusus siswa miskin itu mesti mendaftar dulu ke Dinas Pendidikan untuk pendataan, dengan

menyerahkan fotokopi KMS yang sudah dilegalisir Dinas Sosial, fotokopi hasil UN atau UASBN, dan fotokopi ijazah. Mereka yang tidak mendaftar untuk pendataan, tidak bisa memanfaatkan kuota khusus siswa miskin.

"Pendataan mulai tanggal 22 Juni sampai 27 Juni, khusus untuk mereka yang ingin melanjutkan ke SMP Negeri, SMA Negeri, dan SMK Negeri di Jogja," ujarnya.

Untuk pendataan di Dinas Pendidikan, Suyono minta agar calon siswa datang bersama orangtuanya. Sebab terdapat sejumlah blanko yang harus ditandatangani orangtua.

Dia berharap para siswa maupun orangtuanya cermat memilih sekolah. Walaupun terdapat kuota khusus, mereka tetap harus bersaing dengan sesama calon siswa dari keluarga miskin. Jika pilihan mereka terpusat pada sekolah-sekolah tertentu sehingga

jumlah pendaftarannya jauh melampaui kuota, dikhawatirkan terdapat siswa miskin yang tidak tertampung di sekolah negeri.

Menurutnya, Pemkot tetap menyediakan biaya pendidikan untuk siswa miskin yang bersekolah di sekolah swasta melalui program Jaminan Pendidikan Daerah (JPD). Namun, siswa miskin di sekolah swasta tidak bisa dijamin sepenuhnya menikmati pendidikan gratis. Pendataan calon siswa baru dari keluarga miskin pemegang KMS di Dinas Pendidikan sekaligus digunakan untuk program JPD.

Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) JPD Kota Yogyakarta, Mawardi Dalga mengungkapkan, Pemkot mengalokasikan dana APBD Rp 15,03 miliar untuk JPD tahun ini. Jumlah siswa yang akan dibiayai pendidikannya dengan dana JPD baru diketahui setelah pendataan siswa miskin pemegang KMS. (fir)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Pendidikan	Positif	Segera	Untuk Diketahui
2. Dinas Pajak Daerah dan Pengelo			
3. UPT. JPD			

Yogyakarta, 16 Januari 2025
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005